



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya *International Labour Organization* (ILO) Menangani Isu
Buruh Anak di India Melalui Proyek INDUS

Skripsi

Oleh

Charles Anthony Tampubolon

2015330167

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya *International Labour Organization* (ILO) Menangani Isu
Buruh Anak di India Melalui Proyek INDUS

Skripsi

Oleh

Charles Anthony Tampubolon

2015330167

Pembimbing

Ratih Indraswari, S.IP., M.A.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Charles Anthony Tampubolon
Nomor Pokok : 2015330167
Judul : Upaya *International Labour Organization* (ILO) Menangani Isu Buruh Anak di India Melalui Proyek INDUS

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 5 Juni 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D.

: 

Sekretaris

Ratih Indraswari, S.IP., MA.

: 

Anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Charles Anthony Tampubolon
NPM : 2015330167
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Upaya *International Labor Organization* (ILO)
Menangani Isu Buruh Anak di India Melalui Proyek
INDUS

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Pernyataan ini penulis buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 18 Mei 2020



Charles Anthony Tampubolon

ABSTRAK

Nama : Charles Anthony Tampubolon
NPM : 2015330167
Judul : Upaya *International Labour Organization* (ILO)
Menangani Isu Buruh Anak di India Melalui Proyek
INDUS

Setiap anak wajib terlindung dari segala bentuk ancaman serta terpenuhi hak dan kewajibannya. Menjadi tanggung jawab setiap negara untuk menjaga keselamatan anak sehingga terjamin masa depan mereka. India merupakan negara dengan populasi anak terbanyak kedua di dunia, namun isu buruh anak selalu muncul ke permukaan. Faktor terbesar yang mendorong tumbuhnya buruh anak di India, disebabkan karena kemiskinan. India gagal mengatasi permasalahan buruh anak akibat hukum internal yang dinilai lemah. Oleh karena itu, *International Labour Organization* (ILO) merilis proyek INDUS sebagai upaya penyelesaian masalah buruh anak yang terjadi di India. Adapun pertanyaan penelitian makalah ini yakni **“Apa upaya International Labour Organization dalam menangani isu buruh anak di India melalui proyek INDUS?”** Penelitian berangkat dari asumsi dasar liberalisme klasik dan liberalisme institusional, kemudian analisa dibahas menggunakan teori fungsi organisasi Internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ILO melalui komponen proyek INDUS telah menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional di India. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya Fungsi Informasi, Fungsi Operasional, Fungsi Forum, dan Pengawas Aturan.

Kata Kunci: India, ILO, INDUS, Anak, Buruh Anak

ABSTRACT

Name : Charles Anthony Tampubolon
NPM : 2015330167
Title : *International Labour Organization (ILO) Efforts in Addressing Child Labour Issue in India Through INDUS Project.*

Every child must be protected from all forms of threats along with their rights and obligations. It becomes every state responsibility to look after child safety in order to guaranteed their individual future. India has the largest child population in the world, yet the issues of child labor always appeared in some way. The biggest driving factor that caused the growth of child labor in India due to poverty. India Failed to address the problem child labor because of the internal law which was considered weak. Therefore, International Labour Organization (ILO) released INDUS project as an effort to solve the problem of child labour that happened in India. The research question on this paper will be **“What are the International Labor Organization Effort to handle child labor issue in India through INDUS Project?”** Research departs from the basic assumptions of classical liberalism and institutional liberalism, then the analysis will be discussed using the theory of international organizational functions. The results showed that the ILO through the INDUS project component had carried out its function as an international organization in India. These functions include informational, operational, forum and rule supervision.

Keywords: India, ILO, INDUS, Anak, Buruh Anak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan penyertaan-Nya, penulis diberikan hikmat dan rahmat untuk menyelesaikan pengerjaan skripsi ini dengan lancar dan tidak kurang suatu apapun. Setelah mengalami proses penelitian yang panjang, skripsi yang dibentuk berkat campur tangan Tuhan ini pada akhirnya terselesaikan dengan judul “Upaya *International Labour Organization* (ILO) Menangani Isu Buruh Anak di India Melalui Proyek INDUS.” Adapun skripsi ini penulis susun sebagai syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, yang berlokasi di Bandung.

Isu buruh anak di India merupakan permasalahan yang kompleks. Keberadaannya telah muncul dari tahun ke tahun, sehingga penanganannya membutuhkan upaya yang tepat. Dibalik rumitnya fenomena buruh anak, dalam penelitian ini, penulis jabarkan upaya konkret Pemerintah India dan *International Labour Organization* (ILO) sebagai organisasi internasional. Keduanya bekerja sama menyelesaikan isu ini melalui sebuah proyek berskala nasional bernama Proyek INDUS yang disusun oleh ILO. Penulis menganalisa upaya-upaya mereka melalui teori-teori serta konsep yang telah diajarkan selama menempuh perkuliahan.

Penulis tentunya selama proses pengerjaan ini memperoleh begitu banyak pelajaran berharga. Terkait bagaimana cara berpikir kritis, menghargai waktu, serta tekun menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Apabila dalam makalah ini masih terdapat kekurangan, mohon dimaklumi. Kritik dan saran sebagaimana untuk pembelajaran di masa mendatang sangat diterima oleh penulis.

Bandung, 18 Mei 2020



Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Proses pengerjaan skripsi ini telah didukung oleh banyak pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada sejumlah pihak yang berkontribusi dan mendukung penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Pertama-tama penulis mengucapkan rasa syukur secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yang senantiasa menemani pengerjaan skripsi ini hingga selesai. Kuasa Tuhan berperan besar hingga mampu memberikan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Selanjutnya, terima kasih penulis ucapkan kepada Mba Ratih Indraswari S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Terima Kasih kepada kedua orang tua penulis, Papa, Mama dan Adik, yang terus mendukung dan tiada henti memberikan semangat untuk menyelesaikan pengerjaan skripsi ini.

Terima kasih kepada saudara-saudari penulis yang juga hidup dan merantau bersama di Bandung, Chelsey, Rheza dan Ian. Terimakasih karena konsisten menemani penulis mengerjakan skripsi ini bersama, terlebih mau menghabiskan waktu berlama-lama produktif di sejumlah *coffee shop* yang ada di Bandung.

Selanjutnya, kepada rekan-rekan *Boom Send* seperti Panca, Askarya, Joseph, Osanda, Hans, Stefanus, Erza, Baseloy, Adit, Togu, Timmy, dan Wibi. Terima kasih atas pertemanan selama masa kuliah ini, canda gurau kalian tidak akan pernah penulis lupakan. Terima kasih juga kepada HI Unpar 2015, karena telah menerima penulis untuk menjadi bagian dari keluarga besar di kampus.

Terima kasih kepada Olivia Agata, yang selalu menemani pengerjaan skripsi terlebih disaat masa-masa pandemi Covid-19, yang mau mengkoreksi kesalahan, memberikan ide-ide kecil serta memberikan dukungan dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.2.1 Deskripsi Masalah	9
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	15
1.2.3 Perumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	16
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	16
1.3.2 Kegunaan Penelitian	17
1.4 Kajian Literatur	17
1.5 Kerangka Pemikiran	21
1.6 Metodologi Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data.....	29
1.6.1 Metode Penelitian	29
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	30
1.7 Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II : ISU BURUH ANAK DI INDIA	32
2.1 Pengertian Buruh Anak dan Konvensi International Labour Organization Yang Mengatur Buruh Anak.....	33
2.2 Isu Buruh Anak di India.....	39
2.3 Faktor-Faktor Penyebab Buruh Anak di India	42
2.3.1 Faktor Internal Buruh Anak di India.....	42

2.3.2 Faktor Eksternal Buruh Anak di India.....	45
2.4 Upaya Mengatasi Permasalahan Buruh Anak di India.....	46
BAB III : INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION DALAM MENANGANI ISU BURUH ANAK DI INDIA	50
3.1 Latar Belakang International Labour Organization (ILO).....	51
3.1.1 Visi Misi International Labour Organization	54
3.1.2 Struktur International Labour Organization.....	55
3.1.3 Tujuan Dan Strategi International Labour Organization	57
3.2 Aktivitas International Labour Organization Menghadapi Isu Buruh Anak Secara Global.....	58
3.3 Aktivitas <i>International Labour Organization</i> Menghadapi Isu Buruh Anak Di India.....	62
BAB IV : UPAYA INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION DALAM MENANGANI ISU BURUH ANAK DI INDIA MELALUI PROYEK INDUS	65
4.1 Buruh Anak Pada Target Distrik Sebagai Upaya ILO Menjalankan Fungsi Informasi	67
4.2 Indus Project Sebagai Upaya ILO Dalam Menjalankan Fungsi Operasional.	74
4.2.1 Pengadaan Fasilitas Pendidikan Serta Bantuan Sosial Melalui ‘Pendidikan Transisional’	74
4.2.2 <i>Vocational Training</i>	83
4.3 Indus Proyek Sebagai Upaya ILO Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Wadah Forum	88
4.3.1 Penghasilan Alternatif Bagi Keluarga Buruh Anak.....	88
4.3.2 Mobilisasi Sosial Dan Peningkatan Kesadaran Terkait Isu Buruh Anak	92
4.4 <i>Monitoring & Tracking</i> Sebagai Upaya ILO Menjalankan Fungsi Sebagai Pengawas Aturan.....	95
BAB V	100
DAFTAR PUSTAKA.....	104

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Tabel 1.1: Data Regional Buruh Anak Tahun 2000-2004.....	5
Tabel 1.2: Sektor Pekerjaan Buruh anak di India serta wilayahnya (dalam persen)	9
Bagan 1.1: Skema Teori.....	28
Tabel 2.1: Negara-Negara Asia Selatan yang Belum dan Sudah Meratifikasi ILO <i>Convention on Child Labour</i> 138 dan 182).....	38
Tabel 2.2: Angka total buruh anak di Kota dan Desa (Juta).....	40
Tabel 2.3: Sensus Buruh Anak di India.....	41
Tabel 4.1: Negara Bagian Serta Distrik yang Menjadi Fokus Wilayah Proyek INDUS.....	70
Tabel 4.2: Hasil dari Perhitungan <i>Baseline</i>	71
Tabel 4.3: Implementasi TEC Bulan Maret 2005-2006.....	82
Tabel 4.4: Laporan Beneficiary Tracking System (BTS) tahun 2006.....	98

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1: Data Statistik Buruh Anak di Dunia.....	4
---	---

DAFTAR SINGKATAN

BMS	: Bharatiya Mazdoor Sangh
BPL	: <i>Below Poverty Line</i>
BTS	: <i>Beneficiary Tracking System</i>
CAG	: <i>Core Advisory Group</i>
CEDMAP	: <i>Centre of Entrepreneurship Development in Madhya Pradesh</i>
CLMS	: <i>Child Labour Monitoring System</i>
DUDA	: <i>District Urban Development Agency</i>
DRDA	: <i>District Rural Development Agency</i>
DSTF	: <i>District Survey Task Force</i>
DWCD	: <i>Department of Woman and Child Development</i>
EC	: <i>European Commission</i>
IABA	: <i>Integrated Area Based Approach</i>
IGO	: <i>Intergovernmental Organization</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
INDUS	: <i>India-United States</i>
IPEC	: <i>International Programme on the Elimination of Child Labour</i>
ITC	: <i>Industrial Training Centre</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MCED	: <i>Maharashtra Centre of Entrepreneurship</i>
MDG	: <i>Millennium Development Goals</i>
MNC	: <i>Multinational Cooperation</i>
NAP	: <i>National Action Plan</i>
NCLP	: <i>National Child Labour Project</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NSC	: <i>National Steering Committee</i>
OI	: Organisasi Internasional
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SDG	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SHG	: <i>Shelf Help Group</i>

SNAP	: <i>Support of the National Plan</i>
SRC	: <i>State Resource Center</i>
SSA	: <i>Sarva Shiksha Abhiyan</i>
TACKLE	: <i>Tackling Child Labour Through Education in African, Caribbean, and The Pacific</i>
TEC	: <i>Transitional Education Centre</i>
TOT	: <i>Training for Trainers</i>
TUCCCL	: <i>Trade Union Coordination Committee for the Elimination of Child Labour</i>
UNICEF	: <i>United Nation International Children's Emergency Fund</i>
WFCL	: <i>Worst Form of Child Labour</i>
WDAFL	: <i>World Day Against Child Labour</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehadiran globalisasi melahirkan perubahan terhadap dinamika hubungan internasional. Globalisasi mengarah kepada penyusutan jarak antar benua, peka terhadap rentannya geografi yang luas dan keadaan dunia yang saling berhubungan mengenai aspek-aspek terpenting dalam hidup manusia seperti agama, migrasi perang, keuangan, perdagangan, penyakit, obat-obatan hingga media hiburan.¹ Globalisasi juga melahirkan perubahan terhadap poros politik global yang semula mengandalkan negara sebagai aktor utama, kemudian mendatangkan peranan *non state actor* seperti *Non-Governmental Organization* (NGO) serta organisasi internasional dengan berbagai kegiatan dan jangkauannya sehingga para pengamat mulai menyimpulkan bahwa kemunculan mereka disamaratakan kepentingannya dengan peranan negara-bangsa atau *nation-state*.² Fenomena globalisasi selain melahirkan aktor internasional baru juga mendatangkan isu-su non tradisional yang semakin kompleks sehingga menaruh perhatian negara di dunia dan terselip melalui agenda-agenda nasional mereka.

Salah satu permasalahan non tradisional sebagai akibat dari proses globalisasi yakni dinamika perkembangan isu buruh akibat keterlibatan manusia yang begitu

¹ Richard J Payne, *Global Issues: Politics, Economics, and Culture* 5th Edition, (Boston: Pearson Education, 2012) Halaman 7

² *Ibid*, Halaman 6

masif dan tak terhentikan. Berbagai negara dan organisasi internasional tidak luput dalam menghadapi isu buruh. Menurut Richard J Payne, pertukaran buruh, produk hingga jasa muncul akibat dampak globalisasi ekonomi³ Selain itu, kemajuan ekonomi suatu negara ditentukan dari tingkat mobilisasi dan penggunaan secara intensif sumber dayanya termasuk halnya manusia (buruh).⁴ Hal yang bersifat intensif tersebut mengantar perkembangan buruh seiring waktu berjalan melahirkan isu-isu baru yang semakin mengarah kepada pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Melibatkan anak-anak adalah salah satu pelanggaran tersebut dan mampu dikatakan sebagai bagian dari evolusi buruh yang menyimpang karena pekerjaan yang diterima dan dilakukan anak-anak diselaraskan dengan situasi pekerjaan buruh dewasa pada umumnya sehingga terjadinya perilaku-perilaku eksploitatif.

Menurut *Convention on the Rights of the Child* artikel pertama, diterangkan definisi anak atau *child* yakni seseorang berusia dibawah 18 tahun, terkecuali terdapat hukum di beberapa negara yang mengatur umur legal bagi usia muda dewasa.⁵ Anak secara umum belum memiliki kekuatan fisik serta kognitif yang mencukupi, hal inilah yang membedakan manusia dewasa dengan anak-anak. Dibutuhkan bimbingan selama berlangsungnya proses tumbuh kembang seorang anak dan tanggung jawab mengasuh diserahkan sepenuhnya kepada para orang tua. Hingga akhirnya seorang anak tumbuh menjadi manusia dewasa berkualitas

³ Ibid, Halaman 9

⁴ Paliu Popa, "Economy Globalization and Internationalization of Business", MPRA Paper No. 18568, 1 Nov (2008), diakses pada tanggal 2 September 2018, <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/18568/>

⁵ UNICEF, "The Convention on the Rights of the Child", diakses pada tanggal 9 Juni 2020, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-is-the-convention>

dikarenakan permintaan hak dan kewajibannya seimbang dan tercukupi dengan baik.

Seorang anak dipastikan memperoleh hak dan kewajibannya dengan baik. Hak anak terlebih menjadi bagian dari hak asasi manusia yang wajib, dilindungi, dipenuhi dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah serta negara.⁶ Untuk menjamin hak setiap anak di dunia terlindungi, *United Nation International Children's Emergency Fund* (UNICEF) sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kesejahteraan anak, menggunakan istilah *Child Protection*. *Child Protection* menurut UNICEF merupakan bentuk respon pencegahan segala jenis kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan kejam terhadap anak.⁷ Ciri-ciri permasalahan yang membutuhkan respon *Child Protection*; struktur sosial yang rusak khususnya dalam keluarga, minimnya akses masyarakat terhadap layanan kemanusiaan, mempertahankan budaya kekerasan dan lemahnya pemerintahan daerah, semua akhirnya berujung pada gangguan terhadap keselamatan anak.⁸ Salah satu permasalahan yang diangkat *Child Protection* yakni isu buruh anak.

Isitilah buruh anak atau *Child Labour* secara umum didefinisikan sebagai pekerjaan yang menghilangkan masa muda anak, termasuk potensi dalam diri seseorang.⁹ Menurut *International Labor Organization* (ILO), kondisi pekerjaan

⁶ KEMENPPPA, "Glosary Perlindungan Anak", diakses pada tanggal 2 September 2018, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/22>

⁷ UNICEF, "What is Child Protection?", diakses pada tanggal 2 September 2018, https://www.unicef.org/protection/files/What_is_Child_Protection.pdf

⁸ Dan O'Donnell dan Dan Seymor, *Child Protection: Handbook for Parliamentarians* (Switzerland: UNICEF, 2004), Halaman 9

⁹ International Labour Organization, "What is Child Labor", Diakses pada tanggal 23 Februari 2019, <https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm>

berbahaya yang dimaksud antara lain kondisi pekerjaan yang membahayakan keselamatan fisik, mental, moral hingga sosial sang anak. Pekerjaan yang memaksa mereka untuk menghentikan atau membagi waktu antara bersekolah dan mencari nafkah juga masuk kedalam studi terkait buruh anak. Setiap anak patut terlindung dari bentuk pekerjaan berbahaya (*Hazardous Child Labour*) yang dikategorikan kedalam *Worst Form Of Child Labour*. Istilah tersebut berkaitan dengan lingkungan pekerjaan yang membahayakan seperti terpapar zat-zat beracun, bahan kimia dan penggunaan peralatan berbahaya karena mengabaikan penggunaan alat pelindung diri.¹⁰

Berdasarkan data yang dirilis oleh ILO melalui tulisannya berjudul *Global Child Labor Trends 2000 to 2004*, diterangkan buruh anak yang masuk dalam kategori *working children* (usia 5-17 tahun) total ada sebanyak 218 juta anak di seluruh dunia. Menurut ILO, buruh anak, cenderung melibatkan peranan anak laki-laki dibandingkan perempuan.¹¹ Di tahun 2004, jumlah buruh anak yang bekerja dan masuk kedalam kategori *Worst Form of Child Labor* terhitung sebanyak 126 juta anak. Sama halnya dengan kategori buruh anak sebelumnya, pada tingkat *Worst Form Of Child Labor* ini pula, laki-laki lebih rentan terlibat dalam pekerjaan berbahaya dibandingkan perempuan. Isu mengenai buruh anak tersebar di berbagai wilayah kawasan yang ada di dunia.

¹⁰ International Labour Organization, "The Worst Form of Child Labour", diakses pada tanggal 23 Februari 2019, <https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-orientated/worstforms/lang--en/index.htm>

¹¹ Frank Hagemann, Yacouba Diallo, Alex Etienne dan Farhad Mehran, "Global Child Labour Trends 2000-2004", International Labour Office (Geneva: April 2006), diakses pada tanggal 11 Juni 2020, http://www.ilo.int/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_decl_wp_25_en.pdf

Tabel 1.1: Data Regional Buruh Anak Tahun 2000-2004

Region	Child population (million)		Economically active children (million)		Activity rate (%)	
	2000	2004	2000	2004	2000	2004
Asia and the Pacific	655.1	650.0	127.3	122.3	19.4	18.8
Latin America and the Caribbean	108.1	111.0	17.4	5.7	16.1	5.1
Sub-Saharan Africa	166.8	186.8	48.0	49.3	28.8	26.4
Other regions	269.3	258.8	18.3	13.4	6.8	5.2
World	1'199.3	1'206.6	211.0	190.7	17.6	15.8

Sumber: ILO-Global Child Labor Trends 2000-2004

Berbicara mengenai peta penyebaran buruh anak per kawasannya, seperti yang diketahui pada tabel 1.1, kawasan Asia dan Pasifik menempati posisi pertama yang memegang jumlah buruh anak hingga 122 juta di tahun 2004, lalu diikuti dengan wilayah Sub Saharan Afrika (49 Juta), kemudian Amerika Latin dan Karibia (5.7 Juta). Dikutip dari sebuah buku karangan Kishor Sharma dan Gamini Herath yang berjudul *Child Labor in South Asia*, kawasan Asia terutama Asia Selatan terhitung memiliki jumlah buruh anak terbanyak dan persentasenya mencapai 60%, mayoritasnya berasal dari negara-negara berkembang di Asia Selatan.¹² India pada tahun 2000, menjadi salah satu negara dengan total buruh anak mencapai hingga mencapai 11 juta jiwa di wilayah Asia Selatan tersebut.

Ada beberapa faktor utama yang mendorong munculnya praktek buruh anak. Faktor utama yakni disebabkan karena kemiskinan. Anak-anak bekerja agar

¹² Gamini Herath dan Kishor Sharma, *Child Labour in South Asia*, (Burlington, Ashgate, 2007) Halaman 67

mampu bertahan hidup bagi diri mereka maupun keluarga.¹³ Perolehan upah hasil kerja buruh anak diberikan seluruhnya kepada pihak keluarga ataupun kerabat mereka, hal ini untuk membantu meningkatkan ekonomi rumah tangga dan mendukung anggota keluarga lainnya memperoleh upah pada kegiatan ekonomi lainnya.¹⁴ Alasan tersebutlah mendorong mereka menjadi pemegang kontribusi besar dalam unit keluarga.

Faktor utama kedua terkait dengan masalah pendidikan. Akses sekolah khususnya di negara berkembang masih terbilang sulit. Seringkali anak-anak memutuskan untuk bekerja dikarenakan tidak terbukanya akses ke sekolah.¹⁵ Akses yang sulit tersebut dapat diartikan dengan tidak adanya fasilitas sekolah, pun ketika tersedia, lokasi sekolah terkendala akibat jaraknya yang terbilang jauh. Fasilitas pendukung lainnya seperti buku, alat tulis hingga tenaga pengajar yang tidak tersedia serta tidak memiliki kualitas dan pengalaman mengajar yang baik juga mendorong anak untuk memprioritaskan bekerja dibandingkan bersekolah. Alasan tidak bersekolah juga didukung akibat orang tua yang mendoktrin anak-anak mereka agar lebih memilih bekerja dibandingkan belajar. Pemikiran tersebut biasanya diterapkan oleh para orangtua yang kurang berpendidikan khususnya di daerah-daerah pedesaan. Mereka menilai kehadiran buruh anak ditengah-tengah

¹³ Faraaz Siddiqi dan Harry Anthony Patrinos, "Child Labor: Issues, Causes and Interventions" *Human Capital Development and Operations Policy (HCO) Working paper*, Diakses pada tanggal 23 Februari 2019, http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079934475/547667-1135281552767/Child_Labor_issues.pdf

¹⁴ International Labour Organization, ILO Surveys Quantify Child Labour in Ghana, India, Indonesia and Sinegal, diakses pada tanggal 3 April 2020, https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008051/lang--en/index.htm

¹⁵ *Loc. Cit*, Faraaz Siddiqi dan Harry Anthony Patrinos

lingkungan sosial merupakan keputusan yang normal.¹⁶ Kedua faktor utama diatas merupakan faktor internal yang memunculkan buruh anak, khususnya pada negara-negara berkembang.

Semakin menguatnya isu buruh anak yang menimpa suatu negara, maka siklus kemiskinan dari satu generasi ke generasi lainnya semakin menguat hingga akhirnya melemahkan ekonomi nasional dan menghambat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).¹⁷ Dalam poin SDG ke delapan mengenai pekerjaan layak, disebutkan negara wajib mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang diterima bagi semua orang.¹⁸ Di garis bawah dalam poin ke delapan, pemerintah daerah khususnya negara, diupayakan mencegah perkembangan buruh anak termasuk menciptakan sektor lingkungan kerja informal yang sehat diikuti dengan perlindungan sosial yang responsif. Upaya pemerintah tersebut semakin maksimal apabila diikuti dengan usaha dari *stakeholder* lainnya, salah satunya organisasi internasional.

Salah satu organisasi internasional yang aktif menangani isu buruh anak atau *child labour* hingga sampai saat ini ialah *International Labor Organization* (ILO). ILO menyatukan pemerintah, pengusaha dan pekerja dari 187 negara anggota untuk menetapkan standar ketenagakerjaan, mengembangkan kebijakan

¹⁶ Gamini Herath dan Kishor Sharma, *Child Labour in South Asia*, (Burlington, Ashgate, 2007) Halaman 15

¹⁷ UNICEF, "Child Labor", diakses pada tanggal 7 Maret 2019, https://www.unicef.org/protection/57929_child_labour.html

¹⁸ UCLG: United Cities and Local Governments, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah," Diakses pada tanggal 7 Maret 2019 <https://www.uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf>

serta menyusun program untuk mempromosikan pekerjaan yang layak bagi laki-laki maupun perempuan¹⁹. Untuk memastikan kinerja buruh terpenuhi dengan baik, ILO berupaya menyatukan segala pihak yang terlibat termasuk pengusaha atau perusahaan, pemerintah hingga buruh dibawah program-program naungan ILO. Penyatuan pihak-pihak tersebut menurut ILO bertujuan untuk menciptakan dialog-dialog pembahasan menyangkut implementasi ratifikasi hukum sesuai dengan standar regulasi negara dimana ILO bernaung.

Agar penanganan buruh anak efektif tertangani secara global hingga ke akar permasalahan, *International Labour Organization* memiliki program internasional dalam menangani isu buruh anak bernama *International Programme on the Elimination of Child Labour* disingkat IPEC. Program tersebut memberikan bantuan teknis dan layanan konsultasi kepada 95 negara anggota termasuk Kosovo, dan mempertahankan kegiatan operasionalnya di 81 negara.²⁰ Sasaran IPEC antara lain penghapusan terhadap praktek buruh anak secara progresif dengan memperkuat kemampuan negara anggota dalam menangani isu buruh anak dan mampu mempromosikan gerakan anti buruh anak ke seluruh dunia.²¹ India merupakan *founding member* serta anggota tetap *International Labour Organization* sejak tahun 1922 dan salah satu dari 20 negara di wilayah Asia Pasifik yang mengikuti program penghapusan buruh anak IPEC.

¹⁹ ILO, "About the ILO", diakses pada tanggal 2 September 2018
<https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm>.

²⁰ ILO, "IPEC Worldwide", diakses pada tanggal 2 September 2018,
<http://ilo.org/ipec/programme/IPECintheField/lang--en/index.htm>

²¹ ILO, "About the International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)", diakses pada tanggal 22 September 2018, <https://www.ilo.org/ipec/programme/lang--en/index.htm>.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

India merupakan negara dengan populasi terbanyak kedua di dunia. Diketahui total populasi India sebanyak 945 juta jiwa, menurut data sensus penduduk yang rilis pada tahun 1996.²² Diketahui pula, India merupakan salah satu negara dengan populasi anak terbanyak di dunia, dengan total berjumlah 210 juta anak berusia 5-14 tahun.²³ Tidak bisa ditutupi bahwa negara dengan populasi anak terbanyak menyimpan sejumlah praktik buruh anak yang tersebar di berbagai daerah di India. Berdasarkan data yang dihimpun oleh *India National Sample Survey* 2004-2005, total buruh anak di India diketahui berjumlah hingga 9.07 juta anak, dengan kelompok usia 5-14 tahun.

Tabel 1.2: Sektor Pekerjaan Buruh anak di India serta wilayahnya (dalam persen)

Industry	Rural male	Rural female	Urban male	Urban female
Agriculture, hunting, and forestry; fishing	70.48	75.57	10.22	10.11
Manufacturing	10.64	17.57	29.24	55.32
Construction	3.78	1.29	6.60	4.26
Retail trade, repair of motor vehicles, and so forth	7.21	1.29	33.00	8.5
Hotels and restaurants	2.40	0.57	11.35	1.6
Others	5.5	3.71	9.59	20.21
Total	100.01	100.00	100.00	100.00

Sumber: National Industrial Clasification (NIC) 2004-2005

Praktik buruh anak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dan hal ini berkaitan dengan bidang pekerjaannya pula, kebanyakan berada di daerah

²² Gamini Herath dan Kishor Sharma, *Child Labour in South Asia*, (Burlington, Ashgate, 2007) Halaman 68

²³ Gamini Herath, *ibid*, halaman 68

pedesaan dibandingkan perkotaan.²⁴ Berdasarkan tabel 1.2, ditampilkan beberapa sektor pekerjaan yang cenderung memanfaatkan tenaga buruh anak. Posisi pertama ditempati oleh sektor agrikultur, kehutanan, perburuan binatang serta penangkapan ikan, sebagai sektor yang menggunakan buruh anak terbanyak di India yakni 70% diantaranya berkelamin laki-laki dan 75% perempuan, mayoritas buruh anak tersebut cenderung muncul di daerah pedesaan. Kemudian untuk sektor manufaktur kebanyakan ditemukan di perkotaan, dengan persentase total hingga 29% mayoritas laki-laki dan 55% dikuasai oleh buruh anak perempuan. Terakhir diikuti dengan sektor perhotelan dan lainnya dimana kebanyakan berada di sektor perkotaan.

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya buruh anak di India secara umum disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan yang dialami di rumah tangga memaksakan anak-anak untuk bekerja sebagai buruh anak demi mendapatkan penghasilan.²⁵ Pendapatan penghasilan tersebut demi memenuhi kebutuhan atau mengatasi permasalahan keluarga yang menimpa mereka seperti menebus beban utang atau salah satu keluarga mereka atau tertimpa penyakit/meninggal. Sehingga pola pikir mereka hanya tertuju hanya untuk bertahan hidup. Maka dari itu, *mindset* anak-anak diarahkan untuk bekerja oleh orang tua mereka. Desakan menuntut pekerjaan inilah korban kemudian melewatkan kesempatan untuk menekuni

²⁴ Gayathri Umpathy, "Child Labour in Rural India", IOSR: Journal Of Humanities And Social Science 22, (Issue 7, July 2017), diakses pada tanggal 20 April 2020,

<http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2022%20Issue7/Version-7/H2207075052.pdf>

²⁵ International Labour Organization, "Child Labour in India," diakses pada tanggal 29 Maret 2019, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAx6_mn6fhAhUXT30KHZ2nC2QQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp5%2Fgroups%2Fpublic%2F---asia%2F---ro-bangkok%2F---sro-new_delhi%2Fdocuments%2Fpublication%2Fwcms_557089.pdf&usg=AOvVaw0QN5sJmiwwRI-5g7nm02GS.

pendidikan mereka sehingga India akan terkena dampak kemiskinan berkepanjangan,

Buruh anak di India mengutamakan diri mereka untuk bekerja dibandingkan bersekolah. Tingkat ketidakaktifan anak untuk bersekolah di daerah pedesaan mencapai 7.5 persen sedangkan 5.6 persen di daerah perkotaan dengan kisaran umur 7-17 tahun.²⁶ Edukasi merupakan instrumen penting dalam mereduksi kehadiran buruh anak. Ketika anak-anak mampu menyelesaikan pendidikan mereka hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta tumbuh menjadi manusia yang dewasa maka mereka mampu bersaing dengan buruh lainnya.

Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi penyebaran dan perkembangan buruh anak, termasuk India. Pada tahun 1881, Pemerintahan India mengesahkan hukum dan mengkategorisasikan buruh anak sebagai komponen tenaga kerja yang berbeda diantara buruh lainnya²⁷. Undang-undang tersebut bernama *Factories Act of 1881*. Hukum pertama terkait buruh anak tersebut membahas penetapan usia minimal buruh anak yakni tujuh tahun sedangkan nominal jam kerja yang diperbolehkan maksimal sembilan jam tiap harinya. Hukum-hukum yang mengatur buruh anak di India melalui proses amandemen. *Factories Act of 1881* pada tahun 1922 dikarenakan munculnya desakan ILO, maka hukum tersebut mengalami amandemen sehingga India meningkatkan ketetapan usia buruh anak minimal berusia 15 tahun dengan waktu kerja enam jam lamanya.

²⁶ *Ibid*, Sherin Khan and Scott Lyon.

²⁷ Hugh D Hindman, *The World of Child Labour: a Historical and Regional Survey* (London: Routledge, 2010), 783

Memasuki tahun 1948 amandemen kembali terjadi untuk melarang anak-anak dibawah 14 tahun bekerja pada sektor pabrik.

Terdapat banyak hukum-hukum yang lebih spesifik berdasarkan sektor-sektor pekerjaan yang mengatur buruh anak sebelum akhirnya India menetapkan peraturan terkait buruh anak secara menyeluruh. Hukum tersebut diantaranya *The Indian Port Act of 1931, the Tea Districts Emigrant Labour Act 1932 dan Mines Act 1935.*

Child Labor Prohibition and Regulation Act yang dibentuk pada tahun 1986 merupakan larangan buruh anak pertama berskala besar yang dimiliki oleh India²⁸ Hukum yang dibangun pada tahun 1986 tersebut juga melindungi buruh anak dari sektor-sektor yang tergolong *hazardous*.²⁹ Terdapat diantaranya 18 sektor pekerjaan yang tergolong berbahaya termasuk larangan usia anak dibawah 14 tahun untuk bekerja sebagai buruh. Hukum ini memberikan pengecualian kepada industri-industri *non-hazardous* yang mengatasnamakan keluarga mereka untuk memperkerjakan para buruh anak.

Hukum domestik di India mengalami keterbelakangan terkait upaya penanganan buruh anak. Pertama, tidak adanya hukum spesifik yang menjelaskan sektor industri sebagai sektor yang berbahaya (Hazardous). Kedua, *workshop* yang mendapatkan rekognisi serta ‘dukungan’ dari pihak pemerintah kerap melalaikan tatanan hukum yang ada. Ketiga, sektor industri yang berkembang di India menggunakan buruh anak apabila lingkungan tersebut tidak terpapar sebagai sektor industri yang berbahaya, hingga industri yang dikepalai oleh keluarga terdekat sering

²⁸ Christopher Muscato, “Child Labor in India: History, Laws & Facts”, diakses pada tanggal 31 Maret 2019, <https://study.com/academy/lesson/child-labor-in-india-history-laws-facts.html>

²⁹ Ibid, Hugh D Hindman, halaman 785

memanfaatkan *loophole* tersebut. Sebagai contoh, mempekerjakan anak untuk menjual rokok di jalan raya tergolong dianggap sah (legal) apabila aksi mereka merupakan bagian dari bisnis keluarga.³⁰ Keempat, terdapat perusahaan-perusahaan yang berusaha mempertahankan penggunaan buruh anak di India karena tergolong murah.

Setiap negara di dunia wajib melindungi warga negaranya, termasuk memenuhi hak mereka dan menjamin keberlangsungan hidup mereka. Mulai dari anak-anak hingga dewasa, pemerintah diharapkan mengawasi perkembangan warga negaranya agar menjadi individu yang sejahtera dan mencapai tingkat harapan hidup yang tinggi. Ketika negara lalai mengawasi perkembangan dan memenuhi hak warga negaranya maka seringkali permasalahan-permasalahan bermunculan seperti halnya kemiskinan.

Negara seperti India tentu saja lalai melindungi keberlangsungan hidup anak secara menyeluruh. Padahal anak merupakan warisan negara yang melanjutkan perjuangan bangsa. Ketika seorang anak sejak awal terbengkalai dan hak hidup mereka tidak tersampaikan seperti terjerumus kedalam isu buruh anak, maka menimbulkan efek jangka panjang yang merugikan negara itu sendiri. Kegagalan yang dialami India menangani buruh anak menjadi perhatian yang serius dan membutuhkan peran dan dukungan dari organisasi internasional seperti *International Labour Organization*. ILO memperhatikan kegagalan yang dialami

³⁰ SOS Childrens Villages CANADA, "Child Labor in India", Diakses pada tanggal 31 Maret 2019, <https://www.soschildrensvillages.ca/news/child-labour-in-india-588>

India dan memperbaiki serta mengurangi intensitas buruh anak yang terjadi di negara tersebut.

India merupakan salah satu negara anggota permanen yang turut aktif mendirikan *International Labour Organization* pada tahun 1922. India dan ILO membangun kemitraan yang berselaraskan dengan prinsip kepercayaan dan saling menghormati satu sama lain demi memperkuat kapasitas negara serta membangun kapabilitas lembaga internasional yang lebih baik. Ketika ILO mengeluarkan program internasional bernama IPEC, India menjadi negara yang menyetujui eksistensi dari program tersebut.

IPEC memiliki proyek nasional yang disetujui oleh India untuk mengatisipasi perkembangan buruh anak. Salah satu proyek nasional tersebut bernama proyek *INDUS*. Proyek *INDUS* merupakan proyek penghapusan buruh anak yang didanai oleh pemerintah India melalui Departemen Tenaga Kerja, dan *United States Department of Labor*, berfokus pada rehabilitasi ekonomi keluarga dengan anak-anak yang terlibat buruh anak, melalui pemberian layanan dengan strategi terpadu.³¹ ILO merupakan organisasi internasional yang mengeksekusi program ini untuk diaplikasikan di sejumlah titik lokasi yang ada di India, diantaranya Madhya, Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh dan Delhi.³² Proyek ini juga menargetkan bidang-bidang pekerjaan yang dianggap berbahaya (Hazardous).

³¹ International Labour Organization, "Accelerating Action Against Child Labour", International Labour Office, (Geneva, 2010) diakses pada tanggal 10 Juni 2020, http://iin.oea.org/boletines/boletin5/publicaciones-recibidas-esp/ilo_global_report_on_child_labour_157.pdf

³² ILO, "*INDO-USDOL Child Labour Project for Preventing and Eliminating Child Labour in Identified Hazardous Sector*", diakses pada tanggal 22 September 2018, https://www.ilo.org/newdelhi/whatwedo/projects/WCMS_124679/lang--en/index.htm

Hazardous merupakan tipe eksploitasi buruh anak berbahaya yang patut mendapat perhatian penuh karena mampu mengancam kehidupan serta masa depan anak-anak.

Komponen proyek dari pada INDUS secara garis besar yakni pengidentifikasian wilayah yang terindikasi menggunakan anak sebagai buruh kemudian mengandalkan pendidikan serta pusat pelatihan untuk membimbing para buruh anak yang telah ditarik keluar dari berbagai sektor pekerjaan. Terakhir, proyek ini juga melakukan penguatan bagi para keluarga yang mempekerjakan anak mereka untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan.

Diharapkan dengan hadirnya ILO di wilayah India, urgensi kasus buruh anak semakin terangkat sehingga menimbulkan kesadaran ditengah-tengah masyarakat tentang bahayanya praktik buruh anak bagi masa depan negara. Selama ini, kasus buruh anak di India terkesan tidak diprioritaskan, pemerintah tidak tegas mengangkat isu ini untuk segera diselesaikan. Oleh karena itu melalui proyek INDUS sebagai campur tangan *International Labour Organization* (ILO) di India kiranya penyelesaian buruh anak segera terselesaikan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian dibutuhkan agar analisa terstruktur dengan rapi dan sesuai dengan konteks pembahasan. Maka dari itu, penulis menentukan batas waktu penelitian yang dimulai pada tahun 2003-2007. Dalam kurun waktu tersebut, *International Labour Organization* (ILO) selaku organisasi yang bergerak di bidang ketenagakerjaan dan kemanusiaan meluncurkan sebuah proyek penghapusan buruh anak bernama Proyek INDUS. Proyek tersebut mengandung

sejumlah komponen-komponen yang memberikan dampak penyelesaian terhadap permasalahan buruh anak. Proyek INDUS bertujuan menghapus praktek buruh anak dengan meningkatkan kemampuan fisik dan sosial masyarakat.³³ Kasus buruh anak (child labour) dalam hal ini penulis fokuskan di segala jenis bidang pekerjaan termasuk *Worst Form of Child Labour*. ILO melancarkan proyek tersebut bersama dengan pemerintahan India. Hal ini disebabkan karena India dinilai gagal mengatasi penyebaran buruh anak akibat hukum nasional yang dianggap lemah.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dapat diidentifikasi menjadi: **“Apa Upaya International Labor Organization Menangani Isu Buruh Anak Melalui Proyek INDUS?”**

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh *International Labor Organization* dalam mengatasi isu buruh anak di India. Selain itu, India merupakan negara yang terjangkit memiliki buruh anak karena populasi anak yang paling banyak. Dengan keberadaan ILO sebagai salah satu organisasi internasional terbesar inilah, dibutuhkan upayanya untuk mampu

³³ ILO, “INDO-USDOL Child Labour Project for Preventing and Eliminating Child Labour in Identified Hazardous Sector”, Diakses pada tanggal 22 Maret 2019, https://www.ilo.org/newdelhi/whatwedo/projects/WCMS_124679/lang--en/index.htm

menyelesaikan salah satu krisis kemanusiaan dengan efek jangka panjang mengganggu perkembangan negara.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan baik untuk pembaca maupun penulis mengenai topik buruh anak serta menjelaskan upaya yang dilakukan oleh *International Labor Organization*. Penelitian ini juga berguna sebagai referensi di masa mendatang serta menjadi sarana bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang penulis telah dapatkan selama menempuh perkuliahan.

1.4 Kajian Literatur

Dalam penelitian ini, referensi yang menjadi acuan penelitian antara lain jurnal, buku hingga artikel. Tulisan-tulisan tersebut memiliki keterkaitan dengan kasus buruh anak di India.

Referensi pertama penulis ambil dari sebuah artikel jurnal yang disusun oleh Rigini Singh dan diberi judul "*Child Labor in India*" Menurut Singh, masalah buruh anak mampu teratasi dengan mengadaptasikan berbagai strategi dimulai dengan mempertahankan anak-anak untuk tetap bersekolah, memberikan kesempatan terhadap orang dewasa untuk memperoleh pendapatan, serta melancarkan program pengentasan kemiskinan dengan serentak.³⁴ Kemudian dibutuhkan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan dasar dalam masyarakat, serta peran pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak-anak termasuk

³⁴ Rigini Singh, "Child Labor in India," *Anusandhanika*, 5, I & II (2013): 49

diantaranya perlindungan hukum agar anak-anak tumbuh dalam lingkungan sosial yang produktif serta kesehatan dengan mudah terjamin. Tulisan ini digunakan untuk memperdalam dinamika buruh anak di India, terutama menyangkut faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya buruh anak di India.

Teks kedua merupakan tulisan yang dicetuskan oleh Ajay Kumar Chatteraj dan Sukriti Kejriwal dalam sebuah artikel journal berjudul *The Pathetic Child Labour situation and The Rehabilitation Programme in India*. Penulis mengambil informasi terkait program yang dibangun oleh India. Pada tahun 1988 pemerintah India mengeluarkan sebuah projek yakni *National Child Labor Project* dengan tujuan untuk merehabilitasi para buruh anak yang bekerja dimulai dari 12 distrik endemik yang ada di India.³⁵ Teknik dalam projek ini ialah mendeteksi lokasi praktek buruh anak, kemudian para buruh anak tersebut ditarik keluar dari lingkungan kerjanya kemudian di didik dalam pendidikan umum untuk mendapat pelatihan, termasuk edukasi dasar hingga pemeriksaan kesehatan gratis dan gaji bulanan. Program tersebut juga menargetkan orang tua yang melibatkan anaknya dalam sebagai pekerja untuk mendapatkan sosialisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional. Dalam penelitian ini nantinya, program NCLP dijelaskan lebih rinci lagi sebagai usaha pemerintah mereduksi buruh anak bersama dengan INDUS. Oleh karena itu kajian literatur kedua ini dapat menjadi acuan penulis terkait memperdalam informasi tentang dinamika dan karakteristik kerja dari NCLP.

³⁵ Dr. Ajay Kumar Chatteraj dan Sukriti Kejriwal, "The Pathetic Child Labour situation and The Rehabilitation Programme in India," *Anusandhanika*, IV, II (July 2012): 47

Tulisan Ketiga disusun oleh Ganesh Kumar dengan judul *Child Labour: Determinants, Dimensions and Policies in India*. Tulisan ini menyajikan data-data statistik buruh anak di India dengan masing-masing periode waktu yang berbeda. Data statistik tersebut diantaranya perbandingan jumlah buruh anak di pedesaan dan perkotaan, perbandingan buruh anak menurut jenis kelamin, serta sektor atau bidang pekerjaan. Terdapat pula bagaimana penempatan posisi India mengenai sensus buruh anak diantara negara-negara yang lain yang ada di Asia Selatan diantaranya; Bangladesh, Nepal, Pakistan, dan Sri-Lanka. Hal menarik dalam tulisan Kumar ialah penjabaran regulasi nasional India dalam mengeluarkan aturan terkait buruh anak. Semua berawal ketika komite Gurupadaswamy pada tahun 1979, mengeluarkan surat rekomendasi dan saran, hingga akhirnya Undang-Undang mengenai buruh anak (larangan dan aturan) pada akhirnya terbit pada tahun 1986.³⁶ Data statistik di lapangan di butuhkan agar akurasi penyajian argumen dalam penulisan ini semakin baik, oleh karena itu melalui teks ketiga inilah, penulis mendapatkan informasi terkait perkembangan buruh anak dilihat dari berbagai aspek yang tersedia.

Tulisan Keempat selanjutnya penulis ambil dari sebuah buku yang ditulis oleh Gamini Herath dan Kishor Dharma dengan judul *Child Labour in South Asia*. Salah satu poin yang menjadi perhatian penulis dari tulisan Herath dan Dharma terkait posisi India ketika diperhadapkan dan dibandingkan dengan negara-negara tetangganya yang berada pada satu kawasan sama di Asia Selatan ketika membahas

³⁶ Ganesh Kumar, "Child Labour: Determinants, Dimensions and Policies in India," *Economic Affairs*, 58(4), 417-429 (Desember 2013): 426

masalah isu buuruh anak. Diantara kawasan lainnya, di Asia, khususnya Asia Selatan, memiliki kasus buruh anak terbanyak dan bervariasi jumlahnya di tiap-tiap negara.³⁷ Tulisan ini menjadi acuan penulis saat menjelaskan gambaran buruh anak di Asia Selatan, khususnya di India. Bagaimana dan alasan muncul serta hal-hal yang mendorong keterlibatan anak-anak bekerja sebagai buruh. Data statistik yang mencoba memahami tingkat konsentrasi buruh anak di tiap-tiap negara yang berada di Asia Selatan yang ada dalam tulisan Herath dan Dharma ini juga menjadi salah satu tolak ukur pemahaman penulis ketika kasus buruh anak ditarik secara jauh dari kacamata kawasan, khususnya Asia Selatan, serta perbandingannya dengan India.

Terakhir, tulisan yang penulis ambil berasal dari sebuah buku dengan judul *The World of Child Labor: A Historical and Regional Survey* disusun oleh Hugh D Hindman sebagai *editor*. Buku ini menyajikan kumpulan akademik *essay* sebanyak 222 tulisan, dibuat oleh 190 penulis dikategorikan menurut topik yang dibahas berdasarkan pendekatan dan gaya penulisan tersendiri. Melalui kumpulan penulisan akademik inilah, yang menjadi perhatian penulis yakni sebuah sub-topik tentang *Evolution of the Law on Child Labour in India* ditulis oleh Usha Ramanathan. Menceritakan bagaimana perjalanan hukum mengatur buruh anak di India. Semua di mulai ketika pemerintah India dalam buku undang-undangnya yang terbit tahun 1881, mengakui buruh anak sebagai sebagai komponen buruh yang berbeda dari buruh biasa lainnya.³⁸ Setelah pengakuan tersebut, kedepannya, banyak terdapat hukum-hukum lokal yang lebih spesifik mengatur tentang buruh anak. Penulis

³⁷ Gamini Herath dan Kishor Sharma, *Child Labour in South Asia*, (Burlington, Ashgate, 2007) Halaman 67.

³⁸ Hugh D Hindman, *The World of Child Labor: A Historical and Regional Survey* (New York: M.E Sharpe, 2009), halaman 783

menggunakan informasi terkait evolusi hukum buruh anak untuk menyampaikan titik awal upaya India menghadapi buruh anak melalui hukum nasionalnya yang dibentuk,

1.5 Kerangka Pemikiran

Penulis berangkat melalui pemikiran Liberalisme. Menurut Robert H. Jackson and Georg Sørensen dalam bukunya berjudul *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, tertulis ketidaksetujuan liberalisme terhadap pemikiran sikap/sifat manusia yang dinyatakan selalu mengutamakan kepentingan personal dan bersaing dengan sesamanya. Liberalisme disisi lain mengambil pandangan positif terhadap perilaku serta sifat manusia.³⁹ Hal yang melatarbelakangi pemikiran tersebut dikarenakan individu manusia dipercaya mampu terlibat dalam aksi-aksi kooperatif pada tingkat negara hingga internasional. Tujuannya yakni memperoleh kedamaian, kebahagiaan serta kepuasan bagi setiap individu.⁴⁰ Fokus analisa pemikiran liberalisme mengacu pada entitas individu yang bersifat kolektif, bukan hanya negara, melainkan *Multinational Cooperation* (MNC) termasuk halnya organisasi internasional.⁴¹ Terdapat empat jenis alur pemikiran liberalisme demi hubungan internasional yang lebih kooperatif, diantaranya; Liberalisme Sosiologis, Liberalisme Interdependensi,

³⁹ Robert H. Jackson and Georg Sørensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches Fifth Edition* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 100

⁴⁰ *Ibid*, Halaman 101

⁴¹ *Ibid*, Halaman 130

Liberalisme Institusional, dan Liberalisme Republik.⁴² Pemikiran liberalisme yang penulis kutip dalam tulisan ini yakni Liberalisme Institusional..

Liberalisme Institusional berpendapat bahwa institusi internasional memainkan peran sentral dalam memfasilitasi kerjasama dan menciptakan perdamaian bagi negara bangsa.⁴³ Pemikiran Liberalisme institutionalis menekankan situasi internasional berada diluar permasalahan tradisional sehingga mengandalkan kekuatan militer tidak lagi dianggap sebagai instrumen kebijakan yang efektif.⁴⁴ Institusi internasional terdiri dari organisasi internasional yang dipercaya mampu menyelesaikan berbagai isu dan menjadi aktor sentral selain negara.

Organisasi Internasional atau *Intergovernmental Organization* (IGO) kedudukannya berbeda dibandingkan aktor internasional lainnya seperti *Non-Governmental Organization* (NGO). NGO dibangun atas campur tangan pihak *private* (swasta), bergerak dalam skala kecil demi melancarkan agendanya di berbagai negara. Di sisi lain, organisasi internasional terbentuk atas kesepakatan negara-negara berdaulat.⁴⁵ Persetujuan dari dua atau lebih negara ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian formal. Mereka yang sepakat dinyatakan siap untuk terikat dengan aturan-aturan tertulis, serta berkewajiban mendanai kegiatan operasionalnya kedepan.⁴⁶ Negara-negara anggota mengejar kepentingan bersama mereka termasuk meringankan beban serta permasalahan kepada negara yang

⁴² *Ibid*, Halaman 130

⁴³ Thomas G. Weiss dan Rorder Wikinson, *International Organization and Global Governance Second Edition* (London: Routledge, 2018), 123

⁴⁴ John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics: an Introduction to International Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2005)

⁴⁵ J Samuel Barkin, *International Organization Theories and Institutions*, (New York: Palgrave Macmillan, 2006), 1

⁴⁶ Carol J Koenig, "Non-Governmental and Intergovernmental Organizations," *Military Intelligence Professional Bulletin* 31, 4 (Oktober): 58

membutuhkan dan pergerakannya tidak jauh dari visi misi organisasi internasional yang telah disetujui bersama.

International Labour Organization (ILO), merupakan salah satu contoh organisasi internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menjadi bagian dari subjek penelitian penulis. ILO mempromosikan keadilan sosial dan menjunjung tinggi hak asasi manusia khususnya di sektor ketenagakerjaan, demi terciptanya lingkungan kerja yang ideal, aman dan terhindar dari perilaku-perilaku eksploitatif. Uniknya, ILO bekerja menggunakan sistem tripartisme, yakni melibatkan serikat pekerja dan pengusaha, kedua belah pihak tersebut diselaraskan kedudukannya dengan pemerintah sebagai pencetus berbagai kebijakan dan program sehingga dialog sosial berjalan sesuai dengan keinginan.⁴⁷

Setiap organisasi internasional termasuk diantaranya ILO, menjalankan fungsinya sebagai lembaga internasional demi terciptanya keamanan maupun ketentraman hidup bagi seluruh individu di dunia. Menurut Karns dan Mingst dalam bukunya berjudul *International Organization: The Politics and Process of Global Governance*, organisasi internasional dituntut untuk bergerak menurut fungsinya demi memajukan perkembangan dari konsep keamanan, ekonomi serta sosial.⁴⁸ Fungsi tersebut terbagi kedalam tujuh bagian, diantaranya; Fungsi Informasi, Fungsi Forum, Fungsi Normatif, Pencipta Aturan, Pengawas Aturan, Fungsi Operasional, dan terakhir Fungsi Generasi Ide. Pertama, Fungsi Informasi

⁴⁷ *International labour Organization*, (Geneva: International Labour Office)
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@webdev/documents/publication/wcms_082361.pdf

⁴⁸ *Karns, Margaret P., Karen A. Mingst. And Kendall W. Stiles, International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2015. Hal 26

menuntut OI untuk menganalisa berbagai isu kemudian mengolah serta menyebarkan hasil data yang terkumpulkan termasuk halnya *outcome* dari analisa. Fungsi selanjutnya yakni Fungsi Forum. Organisasi internasional khususnya pada Fungsi Forum menempatkan diri sebagai penyedia fasilitas dalam rangka bertukar pikiran, pengambilan kebijakan serta cara pandang terhadap suatu masalah. Fungsi ketiga yakni Fungsi Normatif, menjalankan kewajiban OI untuk mendefinisikan perilaku yang dinilai standar bagi sebuah negara.⁴⁹ Fungsi keempat yaitu Pencipta Aturan, yakni organisasi internasional melaksanakan pembuatan aturan, terlebih bagaimana organisasi internasional menyepakati perjanjian legal yang mengikat teruntuk negara-negara anggotanya. Fungsi kelima organisasi internasional bekerja sebagai lembaga Pengawas Aturan. Organisasi internasional pada fungsi ini berusaha melihat apakah negara mampu mematuhi aturan yang disepakati bersama, kemudian mengadili negara-negara yang bersengketa dan melaksanakan penegakan hukum. Fungsi keenam yakni menjalankan Fungsi Operasional. Organisasi internasional menyalurkan atau mengalokasikan sumber daya, termasuk bantuan-bantuan secara teknis, serta memberikan bantuan pasukan di daerah konflik.⁵⁰ Terakhir Fungsi Generasi Ide, yaitu organisasi internasional menghasilkan ide-ide terhadap isu. Komponen INDUS yang berkaitan dengan ketujuh poin fungsi-fungsi OI milik Karns dan Mingst mencerminkan upaya *International Labour Organization* (ILO) menangani isu buruh, khususnya isu buruh anak di India.

⁴⁹ *Ibid*, Halaman 27

⁵⁰ *Ibid*, Halaman 27

Konsep buruh anak atau *child labour* tidak memiliki definisi tetap. Hal ini disebabkan adanya ketidakjelasan batasan umur anak yang diterima secara *universal*. Pemerintah setiap negara secara individu mendefinisikan anak menurut kriteria dan umur yang beragam.⁵¹ Misalnya di India, berdasarkan *National Policy For Children 2013*, tertulis definisi seorang anak yakni individu berusia di bawah 18 tahun. Negara lain satu kawasan yang sama seperti Bangladesh, juga memberlakukan seseorang yang dianggap anak ketika usianya dibawah 18 tahun.⁵² Melalui *UN Convention on the Rights of Child*, dipertegas definisi anak yakni semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara.⁵³

Ambiguitas juga muncul pada kata buruh atau *labour* jika dibandingkan dengan kata sejenis lainnya seperti kerja atau *work*. Tidak semua hal yang berhubungan dengan buruh anak atau *child labour* masuk kedalam pelanggaran hak anak dan wajib dieleminasikan. Menurut *International Labour Organization* melalui program khusus pengentasan buruh anak terbesar bernama *International Programme on Elimination on Child Labour* (IPEC), disebutkan buruh anak terjadi apabila pekerjaan tersebut merenggut masa kanak-kanak, termasuk potensi dalam diri hingga martabat, hal-hal tersebut berbahaya bagi perkembangan fisik/mental

⁵¹ Kadriye Bakirci, "Child Pornography and Prostitution: Is This Crime or Work Should Be Regulated?," *Journal of Financial Crime* 14, 1 (2007): Halaman 7

⁵² *National Children Policy*, Ministry of Children and Woman Affairs (February 2011), diakses pada tanggal 1 April 2020, <http://ecd-bangladesh.net/document/documents/National-Children-Policy-2011-English-04.12.2012.pdf>

⁵³ UNICEF, "Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak", diakses pada tanggal 1 April 2020, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

mereka.⁵⁴ Menghalangi anak untuk bersekolah dan tetap memaksanya bekerja juga masuk kedalam kategori buruh anak.

Muncul juga istilah *child work*, berbanding terbalik dengan pengertian buruh anak dimana terkesan memiliki konotasi negatif serta eksploitatif. *Child Work* menurut UNICEF justru diperbolehkan dan diartikan sebagai bentuk partisipasi anak atau remaja mengikuti kegiatan ekonomi yang tidak berdampak negatif terhadap kesehatan dan kehidupan menyeluruhnya, serta tidak sekalipun mengganggu pendidikan mereka.⁵⁵ Rangkaian aktivitas *Child Work* misalnya; membantu orang tua di rumah, membantu bisnis keluarga di luar jam sekolah dan mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh uang saku tambahan pada saat libur sekolah. Menurut ILO, *Child Work* dikatakan sebagai bagian dari proses pengembangan diri anak dan bertujuan mensejahterakan keluarga, dikarenakan *Child Work* mampu mengasah keterampilan dan mempersiapkan diri mereka di dunia kerja yang produktif⁵⁶.

Konsep mengenai *Worst Form of Child Labour* merupakan bentuk turunan dari buruh anak khususnya yang terpapar kegiatan berbahaya atau *hazardous*. ILO-IPEC menegaskan, *Worst Form of Child Labour* muncul akibat kompleksitas permasalahan buruh anak yang sifatnya masif serta rumit, sehingga dibutuhkan penanganan berprioritas dan menargetkan rangkaian pekerjaan-pekerjaan '*worst*

⁵⁴ International Labour Organization, *Child Labour: Textbook for University Students*, (Geneva: International Labour Office, 2004), 16

⁵⁵ UNICEF, "Fact Sheet", diakses pada tanggal 1 April 2020, https://www.unicef.org/protection/files/child_labour.pdf.

⁵⁶ International Labour Organization, "What is Child Labour", diakses pada tanggal 1 April 2020, <https://www.ilo.org/ipecc/facts/lang--en/index.htm>

form' demi pemberantasan yang cepat dan tuntas.⁵⁷ *ILO Convention 182* didalamnya membahas secara rinci pengertian *Worst Form Of Child Labour* khususnya pada artikel ketiga, terkait definisi WFCL yakni pekerjaan-pekerjaan buruh anak yang didalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

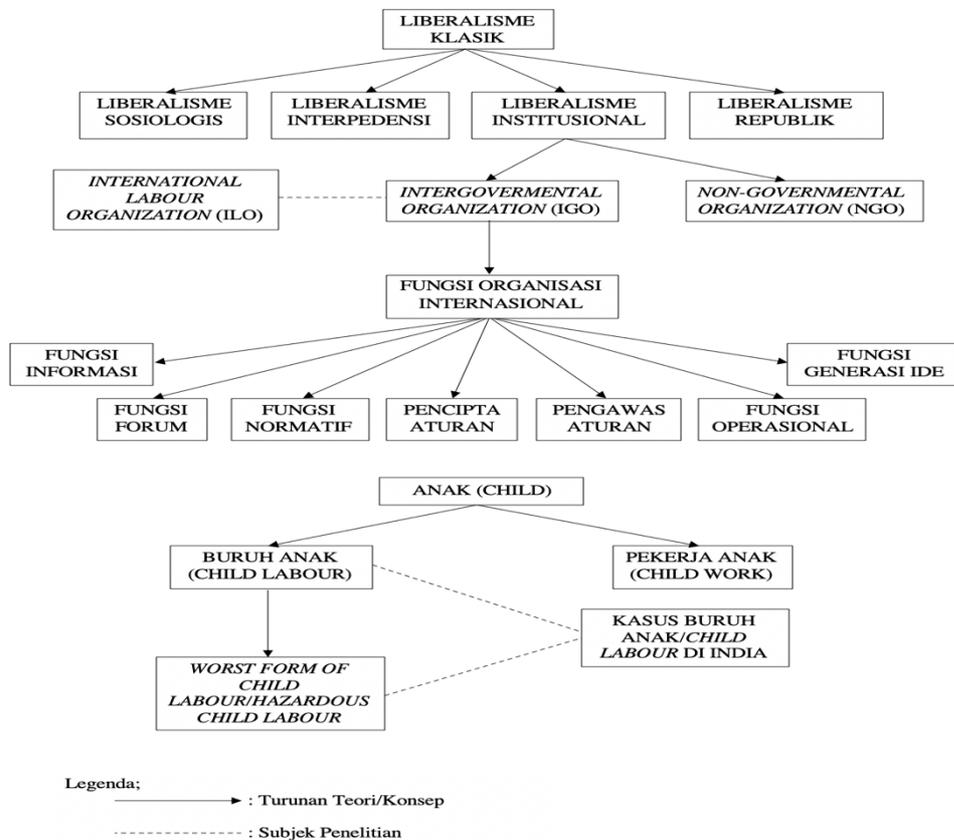
- a) Praktik perbudakan anak atau sejenis, termasuk di dalamnya perdagangan anak secara paksa serta perekrutan wajib demi kepentingan konflik bersenjata.
- b) Pengadaan dan penggunaan anak dalam dunia pelacuran, terlibat dalam produksi yang berhubungan dengan pornografi.⁵⁸
- c) Pelibatan anak dalam hal perdagangan obat-obatan atau kegiatan terlarang lainnya sebagaimana telah diatur dalam perjanjian internasional.
- d) Pekerjaan yang menurut keadaan dan sifatnya membahayakan keselamatan, mengganggu kesehatan, hingga kondisi mental sang anak.

Penulis menjelaskan upaya ILO melalui proyek INDUS di India dimana tengah mengatasi kasus buruh anak yang didalamnya juga terdapat pekerjaan berbahaya atau *hazardous*.

⁵⁷ Hugh D Hindman, *World of Child Labour: an Historical and Regional Survey* (New York. Sharpe, 2009), 79

⁵⁸ *Ibid*, Halaman, 79

Bagan 1.1: Skema Teori



Berdasarkan skema teori (Bagan 1.1) penelitian berangkat dari asumsi teori liberalisme klasik. Dalam liberalisme klasik, disebutkan bahwa individu bergerak secara kolektif, hal tersebut menandakan bahwa negara bukanlah aktor sentral karena aktor lain seperti halnya organisasi internasional (OI) memainkan peran penting dalam dinamika hubungan internasional. Peranan penting OI masuk kedalam alur pemikiran liberalisme institusional dan semakin menekankan bahwa organisasi internasional atau biasa disebut *Intergovernmental Organization* (IGO) didalamnya terdapat keanggotaan yang terdiri dari negara-negara banyak yang mencoba menyelesaikan berbagai isu termasuk meringankan beban permasalahan menurut visi dan misi terbentuknya OI/IGO tersebut.

Maka dari itulah, pada tulisan makalah kali ini, penulis mencoba untuk menitikberatkan pada peranan salah satu OI yakni *International Labour Organization* (ILO) yang juga merupakan subyek penelitian penulis. ILO merupakan organisasi dibawah naungan PBB yang membahas masalah terkait isu kemanusiaan di bidang ketenaga kerjaan. Isu dan permasalahan tersebut menyangkut berbagai hal termasuk salah satunya isu mengenai buruh anak atau *Child Labour*. Isu buruh anak atau child Labour merupakan permasalahan yang kompleks, perlu diteliti juga bahwa tidak semua anak yang bekerja masuk kedalam ranah buruh anak atau *child labour*. Mereka yang disebut buruh anak terjadi ketika beban pekerjaan mereka merenggut masa depannya, membahayakan keselamatan dan menghambat perkembangan fisik dan mental. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya bahwa buruh anak mampu berada di lingkungan berbahaya atau disebut *worst form of child labour*. Kedua jenis tipe buruh anak tersebut menjadi perhatian penulis untuk dianalisa dalam tulisan ini. Adapun alur analisa tidak jauh dari turunan teori dari fungsi organisasi internasional. Teori yang dicetuskan oleh Karns dan Mingst tersebut, menjadi landasan analisa penulis membahas upaya ILO mengatasi isu buruh anak atau lebih spesifiknya, isu buruh anak yang terjadi di India.

1.6 Metodologi Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan membahas permasalahan secara deskriptif. Metode penelitian

kualitatif mengandalkan pengumpulan data untuk kemudian di analisa. Menurut John W Creswell, analisa mengacu pada data-data berupa teks serta dianalisa membentuk sebuah uraian.⁵⁹ Dokumen publik seperti berita ataupun *private document* seperti journal, report dan lain-lain menjadi acuan sumber data penelitian.⁶⁰ Metode penelitian ini berkaitan dengan penjelasan penelitian secara deskriptif membahas masalah buruh anak di India termasuk menganalisa peranan ILO melalui proyek INDUS.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka dan dokumen. Penulis memperoleh data dari jurnal, buku dan media cetak. Penulis mengumpulkan informasi terdahulu sehingga diperoleh data-data sekunder. Data-data tersebut menjadi acuan penulis untuk menunjang penelitian serta menjadi bahan dasar analisa kedepannya. Data-data yang ada merupakan sumber yang terverifikasi kebenarannya dan ditulis menurut etika penulisan yang benar. Data-data tersebut penulis kumpulkan dan telaah lebih dalam serta dikaitkan dengan penelitian penulis. Tidak lupa, perolehan data-data tersebut menggunakan sistem triangulasi data, yakni sumber tulisan berasal dari berbagai sudut pandang agar argumen terkesan luas dan melibatkan banyak pihak.

⁵⁹ John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2002).

⁶⁰ Ibid, John W Creswell

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini dibagi menjadi lima bagian, dimulai dari Bab I – Bab V

Bab I membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah tujuan serta kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan terhadap penelitian yang penulis lakukan.

Bab II penulis membahas situasi dan kondisi buruh anak di India. Dalam bab ini, dijelaskan definisi buruh anak menurut Konvensi ILO, Kemudian diuraikan faktor internal serta eksternal munculnya buruh anak, serta implikasinya terhadap kehidupan mereka kedepan. Lalu terkahir Upaya India melawan isu buruh anak.

Bab III memasuki peran dari Organisasi internasional yang menjadi variabel penulis yakni *International Labour Organization* (ILO), tedapat diantaranya latar belakang ILO, lalu upaya ILO menghadapi buruh anak secara global maupun saat berada di India.

Bab IV menjelaskan peran ILO menangani isu *child labour* di India. Melalui proyek INDUS, penulis menjelaskan upaya yang dilakukan ILO di India.

Bab V penulis menjelaskan kesimpulan mengenai permasalahan buruh anak di India. Serta menjabarkan apa saja yang telah dilakukan ILO menangani isu buruh anak di India.

